



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KAB. BANGKA**





**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

16. Penganggaran berbasis Program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2026 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

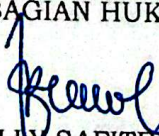
Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2026 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 ini memuat laporan evaluasi dan capaian evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 terhadap Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 serta perumusan program dan kegiatan serta anggarannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja OPD dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad-Nya kepada kita semua, amin.



Sungailiat, 08 Agustus 2025
Kepala Dinas,

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
N.P. 19660819 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	25
2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD.....	32
2.5 Penelaah Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	48
3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.....	65
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	65
5.3 Rencana Tindak Lanjut	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	9
Tabel 2.2 Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan terintegrasi di Kabupaten Bangka Tahun 2024	12
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2025	16
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	22
Tabel 2.5 Pencapaian Target Kinerja IKK Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.....	23
Tabel 2.6 Indikator Sasaran Tahun 2024-2026	25
Tabel 2.7 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinkominfotik	25
Tabel 2.8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	38
Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2025	25
Tabel 3.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bangka Tahun 2026	48
Tabel 3.2 Keterkaitan antara Tema dan Prioritas Pembangunan Kab. Bangka Tahun 2026 Dengan sasaran Pembangunan	48
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan Sasaran dan Target Renja 2026	50
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kab Bangka	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan secara bertahap dan simultan. Setelah penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja yang dimulai pada minggu kedua tahun sebelumnya, tahapan penyusunan perencanaan perangkat daerah memasuki tahapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan terakhir penyusunan Rancangan Akhir dan penetapan Rencana Kerja.

Penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan periode Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026, maka penyusunan Rancangan Renja Dinkominfo Tahun 2025 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 diperintahkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026. Penetapan Renstra tersebut paling lambat dilaksanakan pada minggu ke empat bulan Maret Tahun 2023. Selanjutnya Renstra Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Selain hal tersebut diatas, penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2026 juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Dinkominfo tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinkominfo Tahun 2025 telah selaras dengan rencana pencapaian sasaran Renstra Dinkominfo yang secara bersama-sama dengan penyusunan Renja dirumuskan. Renja Dinkominfo tahun 2026 juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86b Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfo) Kabupaten Bangka menyusun Renja Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2026 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappeda
- d. Perumusan Renja Perangkat Daerah
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026;

2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Dinkominfo Kabupaten Bangka disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 yaitu ***“Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi unggulan Secara Berkelanjutan”***.

Tema dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 di atas berfokus pada 3 (tiga) komponen-komponen fondasi utama pembangunan yang terdiri dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Diskominfo Kabupaten Bangka dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun

- 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026, yaitu :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinkominfo;.
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Renstra 2024-2026 sebagai Tahun ketiga periode 2024-2026;
3. Tersedianya penjabaran Rencana Strategis Dinkominfo kedalam Rencana Operasional Tahun 2026;
4. Terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan

tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinkominfo;

5. Terlaksananya pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
6. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian, statistik antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.
7. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan didalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka adalah penjabaran tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada 5 (lima) tahun sebelumnya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinkominfotik ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh dinkominfotik selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2024 Anggaran Belanja Langsung Dinkominfotik Kabupaten Bangka sebesar Rp.9.847.657.958,00 untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 11 (sepuluh) Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi keuangan sebesar Rp.9.537.937.766,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 88,62%.

Sementara itu, untuk pelaksanaan Tahun anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar **Rp.8.557.984.172,00** untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Tingkat Kinerja

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinkominfotik Tahun 2024-2026 dan diperjanjian secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian IKU Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024
			Target	Realisasi	%		
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (76,15)	BB (76,15)	BB (71,53)	93,93	100	93,93
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00	78,00	78,90	101,15	100	101,15
3.	Persentase layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	66,67	66,67	100,00	149,99	100	149,99
	Rata-rata Capaian				115,02	100	115,02

Secara umum capaian kinerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinkominfotik Tahun 2024-2026 bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja atas indikator **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** dan **“Persentase layanan Teknologi Informasi melalui SPBE”** yang sesuai dengan RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Akan tetapi capaian ini tidak bersifat permanen. Apabila Dinkominfotik tidak berhati-hati dalam mengendalikan

pencapaian kinerjanya maka dapat dipastikan capaian kinerja atas semua indikator tersebut dapat menurun atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat kami tampilkan di Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka No.188.45/87/SK/DINKOMINFOTIK/2025 tanggal 15 Januari 2025 dibawah ini :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 95336
E-mail : dinkominfotik@bangka.go.id Website: bangka.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 188.45/ 87 /SK/DINKOMINFOTIK/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA ,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan menciptakan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas salah satunya dapat ditentukan melalui penyusunan dan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf b, hasil perhitungan dan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 7 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN

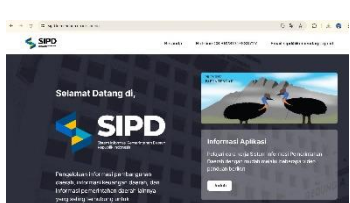
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024, dengan indeks hasil survey 78,90.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

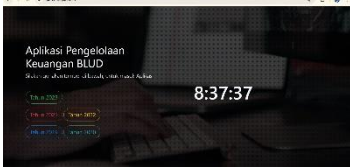
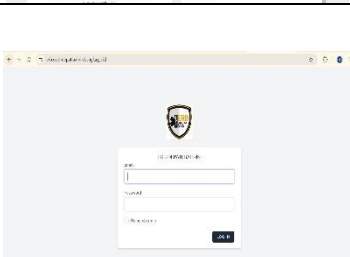
Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Januari 2025

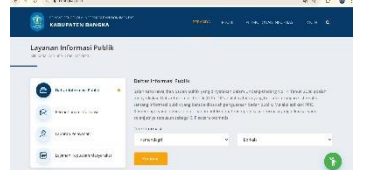


Untuk indikator Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE
DAN TERINTEGRASI DI KAB. BANGKA TAHUN 2024

No	Perangkat Daerah	Layanan Publik Secara Online dan Terintegrasi	Sub Layanan Publik	Keterangan
1.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Layanan Perizinan dinmp2kukm.bangka.go.id	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Lokasi 3. Izin Usaha Jasa Kontruksi	
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Kependudukan Online pesonadukcapil.bangka.go.id	1. KK 2. Suket 2 3. KK Kitap	
		Layanan Kependudukan Online bit.ly/pokemonbangka	Akte Kematian	
		Laynan Kependudukan Online bit.ly/m/TREKMATRASDUKCAPILBANGKA	Tim Reaksi Cepat Melayani Masyarakat Priortitas	
3.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	Layanan Pajak Sistem Dukungan dan Pelayanan Pajak (SEDULANG) Kabupaten Bangka	1. Pajak	
		Layanan Perencanaan dan Keuangan sipd.kemendagri.go.id	1. Anggaran	

		Layanan Pengadaan Barang dan Aset simbmd-bangkakab.simdacloud.id	1. Belanja Modal 2. Aset	
		Layanan Pengelolaan Keuangan BLUD blud.bangka.go.id	Keuangan BLUD	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Informasi Manajemen Bangunan Gedung simbg.pu.go.id	1. Persetujuan Pembangunan Gedung	
5.	Dinas Pariwisata dan Budaya	Layanan Informasi Pariwisata exotic.bangka.go.id	1. Informasi Wisata 2. Reservasi Hotel	
6.	Dinas Kesehatan	Layanan Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman smartinpirt-bangka.babelprov.go.id/smartin_pirt/	Izin Produksi Makanan dan Minuman	
		Layanan Informasi Kesehatan	Informasi Manajemen Pasien di Puskesmas	
		Layanan Ketersediaan Bed Fasilitas Layanan Kesehatan spgdt.bangka.go.id	Ketersediaan Bed Rumah Sakit	
		Layanan Donor Darah sidora.bangka.go.id	Stok Darah	
		Layanan Kesehatan Yang Dikembangkan Oleh RSUD Depati Bahrin Bangka ERB (Emergency Rescue Brigade) erb.rsud-depatibahrin.bangka.go.id Playstore : ERB Depati Bahrin	Penjemputan Pasien Sampai Ke Rumah Sakit	

		Layanan Informasi Covid-19 covid19.bangka.go.id	Data Statistik Covid19 Bangka	
7.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Layanan Pengaduan Sp4n Lapor lapor.go.id	Pengaduan Online Rakyat Sebagai Admin Kabupaten Bangka	
		Layanan Informasi Publik ppid.bangka.go.id	Informasi Publik	
		Layanan Satu Data Indonesia satudata.bangka.go.id		
		Layanan SPBE spbe.bangka.go.id	1. Formulir Pengaduan SPBE 2. Pendataan Akses Internet 3. Formulir Administrator Pengelola Layanan SPBE 4. Absensi Sertifikat BimTek Smart City Tahap IV Tahun 2023	
8.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Layanan Data Keluarga BKKBN siga.bkkbn.go.id	Laporan Data Keluarga Berencana	
9.	Dinas Sosial	Layanan Kesejahteraan Sosial dan Bansos siks.kemensos.go.id	1. Mengelola data kesejahteraan sosial 2. Memproses pendaftaran bansos 3. Memasukkan dan memperbarui data kemiskinan	
10.	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Ketenagakerjaan siapkerja.kemnaker.go.id	1. Informasi lowongan kerja 2. Informasi Pelatihan Keterampilan	

		Layanan Administrasi Kepegawaian sipakdu.bangka.go.id	Administrasi Pegawai Dinakerperindag	
11.	BKPSDMD	Layanan Pesiun pensiunan-siasn.bkn.go.id	Data Pensiun Kabupaten Bangka	
		Layanan Absensi Kepegawaian sidikjari.bangka.go.id	1. Absensi Fingerprint 2. Data Pegawai 3. Laporan Pekerjaan Harian	
		Layanan Informasi ASN (CPNS, PPPK, Lelang Jabatan) bkd.bangka.go.id	Informasi Pengadaan dan Pengumuman CPNS, PPPK, dan Lelang Jabatan	
12.	Sekretariat Daerah	Layanan Informasi Lelang Barang dan Jasa lpse.bangka.go.id	Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik	
		Layanan Dokumen dan Informasi Hukum jdih.bangka.go.id	Dokumen Hukum	
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Layanan SRIKANDI srikandi.arsip.go.id	1. Surat menyurat 2. Arsip	

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan gambaran Kinerja Tahun Pertama untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan RPD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Renstra Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka pada tahun 2024 tidak mengalami hambatan yang berarti, terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang terpenuhi, bahkan realisasi kinerja melampaui target. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di form berikut :

Tabel 2.3 (T.C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	30,00	29	29,25	29,25	100			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13,50	10	10,25	10,25	100			
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	13	12,5	13	13	100			
		Indeks tata laksana organisasi perangkat daerah	4,5	4,25	4,5	4,5	100			
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0	0	0	0	0	0		0
		Indeks Profesionalisme Aparatur	72,00	67	67,1	67,1	100	70,00		100
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,10					4,00		100
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13,50					13,00		100
		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	30,00					29,53		100
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100					100		100
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	29	100	100	100	100		100
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	10	100	100	100	100		100
2.16.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	21	7	7	7	100	6		100
2.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	36	12	12	12	100			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19					4		100
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100		100
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100	100	100	100	100			
2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100			
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun(laporan)	114	38	38	38	100			
		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)						29		100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12		100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2		100
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100	100	100	100	100	100		100
2.16.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	3	16	16	16	100	1		100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1				1	1		100

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1					1	1		100
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100		100
2.16.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang Tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12			100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12					12			100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1					1			100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset Perangkat Daerah (%)	0					0			100
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan									
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan									100
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang Dikelola sesuai peraturan (%)	100	100	100	100	100	100	100		100
2.16.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12			100
2.16.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12			100
2.16.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12			100
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	100	100	100	100	75			100
2.16.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang tertangani (unit)	33	11	11	11	100	12			100
2.16.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	3	1	1	1	100	1			100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1					1			100
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	100	100	100	100	100				
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80					75			100
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab	Persentase regulasi yang diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik (%)	98	67,14	67,14	67,14	100				
		Persentase Informasi dan Dokumentasi yang dikelola						100			100
		Persentase Informasi publik yang disampaikan melalui media						100			100
		Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti						100			100
		Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia						50			100
		Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi						100			100
2.16.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disampaikan kepada	100	500	500	303	60,6				
		Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50					30			100
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi public milik pemere=intah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis	70					70			100
	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis									

	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya								
		Jumlah ASN bidang komunikasi public yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2					2		100
2.16.02.2.01.10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SARPRAS yang Tersedia (paket)	3	1	1	1	100			
		Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	9	3	3	2	66,67			
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi Program atau Kebijakan								100
2.16.02.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	100	30	213,33	94	44,1			
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50	96,55	193			
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan intra Pemerintah (JIP)	83,33					83,33		100
		Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE	100					100		100
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik								
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Regulasi yang Diterbitkan di Bidang Tata Kelola TIK (%)	100	100	100	100	100			
		Nilai Domain kebijakan internal	2,50					2,50		100
		Nilai Domain Layanan SPBE	2,45					2,45		100
		Nilai Domain Tata Kelola SPBE	3,95					3,95		100
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE (nilai)	3,1	2,7	3	1,85	61,67			
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (aplikasi)	15	5	5	6	120			
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung layanan pmda	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan system penghubung layanan pmda	12					12		12
	Penyelenggaraan Jaringan intra pemerintah daerah Kab/Kota	Jumlah PD di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra oemerintah daerah kab/Kota	34					34		34
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								
2.20.02	PROGRAM PPENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50	96,55	193			
		Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi	100					100		100
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	100	100	100	100	100			
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	15	5	5	5	100			
	Penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup daerah kab/kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100					100		100
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi								

	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun								
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50	96,55	96,55			
		Indeks KAMI (Kematangan)						1		100
2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab	Indeks KAMI (Kematangan)	2	1	1	0	1			
		Nilai Tata kelola Keamanan Informasi	1					1		100
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kab/kota berbasis	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kab/kota berbasis elektronik dan non elektornik	2							
2.21.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan IT Security Assesment (aplikasi)	12	4	4	0	0			
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34					34		100

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan output **Indeks KAMI**, realisasinya tidak ada.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan output **Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan ITSA**, realisasinya tidak ada.

b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024, program/kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan:
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan kegiatan:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial
 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c. *Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran:*
- Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.
- d. *Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:*

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait

e. *Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah*

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra 2024 – 2026, secara umum seluruh program/ kegiatan ditarget akan direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);
- 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);
- 3) Program Aplikasi Informatika target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab berdasarkan uraian pada sub bab 2.1.3, maka dapat diambil kebijakan/ tindakan sebagai berikut :

1. Menyusun kembali program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Menyusun kembali penetapan target kinerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tahun 2025 Dinkominfotik Kabupaten Bangka menyelenggarakan 3 (tiga) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Unsur Komunikasi dan Informatika, Unsur Persandian serta Unsur Statistik. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 (T.C 30)
Pencapaian Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka
Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah (%)			Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2024	2025	2025	2026	
1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (76,15)	BB (80,00)	A (82,00)	BB (71,53)	-	BB (80,00)	A (82,00)	
2	Persentase layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	66,67	83,33	100	100	-	83,33	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	82	78,9	-	80	82	

Tabel 2.5
Pencapaian Target Kinerja IKK Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka
Tahun 2024 – 2026

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Target 2024-2026		
					2024	2025	2026
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 26. Jumlah PD = 34	100	100	100
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 56 Jumlah Layanan Publik = 58	100	100	100
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 259837. Jumlah penduduk = 327394	79,36	79,36	79,36
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 34. jumlah PD = 34	100	100	100
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 34. jumlah PD = 34	100	100	100
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 0. Jumlah area penilaian = 5	4	4	4

Dalam pencapaian target kinerja Renstra Dinkominfo 2024-2026 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target sampai dengan tahun 2024 yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat” dan “Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE”** yang sesuai RPJMD.
2. Capaian atas indikator kinerja indeks e-government, indeks keterbukaan informasi publik dan persentase data statistik yang akuntabel, merupakan indikator kinerja dengan capaian yang belum sesuai dengan target renstra.
3. Perkembangan kondisi keuangan Pemda Kabupaten Bangka yang devisit setelah wabah Covid-19 membawa perubahan luar biasa dalam tatanan APBD Dinkominfo, terjadi berbagai penyesuaian

sebagai antisipasi terlaksananya program dan kegiatan yang menjadi indikator utama Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Tingkat Pelayanan Dinkominfotik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menjadi wewenang Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistic, persandian dan e-government;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistic, persandian dan e-government;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistic, persandian dan e-government;
- d. Pelaksanaan asministrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistic, persandian dan e-government; dan
- g. Pembinaan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Dinkominfotik Tahun 2024-2026 ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu :

Tabel 2.6
Indikator Sasaran Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target			Ket
				2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	66,67	66,67 %	83,33 %	100,0 %	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,57	78,00	80,00	82,00	
2.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (76,15)	BB (76,15)	BB (80,00)	A (82,00)	

2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinkominfotik

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakannya, terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

Tabel 2.7
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinkominfotik

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Ketimpangan tingkat literasi digital masyarakat masih tinggi	a. Literasi digital masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. b. Program kegiatan yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat terutama di pedesaan sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi dan memperoleh akses atas informasi publik, layanan dasar dan program strategis Pemerintah.
2.	Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD	a. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3.	Infrastruktur Jaringan Intra	a. Dukungan Sumber Daya Manusia

	Pemerintah Daerah yang belum Handal	dengankualitas personil yang menunjang kinerjaorganisasi
4.	Penerapan Sistem Keamanan Informasi belum Optimal	a. Adanya peralatan kontra penginderaan yang di pinjam pakai dari BSSN.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah dan Capaian Program Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Bangka, dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi, maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

a) Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan public. Undang-Undang Republik nesia Nomor 14 Tahun 2008 teang Ketthukaan Informasi Publik, reformal dalam NKRI membawa dalam system adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

b) Komitmen terhadap e-development

Pada era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Bangka memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder. Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

Secara umum, kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Indeks SPBE dengan taget 3,1
2. Predikat AKIP dengan target B

4. *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkominfotik*

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran, beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinkominfotik adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya peran Dinkominfotik yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
2. Tingginya kepercayaan Bupati dan OPD terhadap keberadaan Dinkominfotik dalam hal penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
3. Kualitas SDM Dinkominfotik yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;

6. Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan dan evaluasi.

5. *Formulasi Isu-isu Penting*

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2024-2026 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik, persandian dan teknologiinformatika
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian, statistik dan komunikasi informasi publik.
- d. Belum optimalnya pelayanan e-Government.
- e. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
- f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data / informasi pemerintah daerah belum layak /belum optimal.
- g. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi
- h. Belum optimalnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PerangkatDaerah.
- i. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi.
- j. Pengadaan infrastruktur di Bidang TIK, Pembangunan infrastruktur TIK memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinkominfotik dalam jangka menengah dan panjang yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap guna terciptanya E-Government (Pemerintah berbasis Elektronik);
- k. Peran KIM yang belum maksimal sehingga mitra pemerintah yang menjadi penyambung pemerintah dengan masyarakat sampai tingkat desa;
- l. Desiminasi infrastruktur pembangunan pemda yang belum maksimal tersampaikan kepada masyarakat sehingga perlu adanya inovasi selain kegiatan pameran pemda dan media informasi yang belum berbasis TIK;
- m. Masih banyaknya permohonan pengaduan ke komisi informasi yang belum terselesaikan di PPID Pembantu dan pelayanan yang belum berbasis TIK;

- n. Data statistik yang dilaksanakan kerjasama dengan BPS perlu diadakan evaluasi untuk keakuratan datanya dan data statistik yang berbasis website belum terbangun.

Analisis terhadap isu strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dapat diidentifikasi melalui beberapa hal sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

a) Kekuatan

- 1) Komitmen Pimpinan Daerah dalam penerapan egovernment. Hal ini ditunjukkan dengan penertiban email perangkat daerah dan optimalisasi penggunaan email tersebut dalam penyampaian informasi, juga mendesak terwujudnya command centre dalam rangka pengendalian dan percepatan komunikasi dan informasi internal pemerintah kabupaten serta dengan publik;
- 2) Ketersediaan infrastruktur untuk memulai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang dinilai saat ini mampu mendukung runningnya aplikasi utama di Pemerintah Kabupaten Bangka (e-planning, e- budgeting/sipkd, eperijinan/sipadu, pajak online, dsb).
- 3) Kerjasama yang baik dengan stakeholder bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun dan mengembangkan e-government.

b) Kelemahan

- 1) Komitmen dan Keterlibatan pejabat dalam workflow aplikasi. Bahwa proses penerapan sebuah aplikasi pada setiap perangkat daerah terlihat hanya menjadi urusan middle management hingga ke staff. Top management disetiap perangkat daerah tidak banyak yang mau terlibat aktif atau punya keinginan yang kuat untuk turut menguasainya.
- 2) Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS (Tingkat Literasi TIK). Minimnya kualifikasi PNS dibidang IT dan jumlah PNS yang menguasai IT yang tidak banyak juga mempengaruhi progress atau proses pengembangan e-government.
- 3) Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap perangkat daerah. Penguatan daya terima terhadap sebuah perubahan di masing-masingperangkat daerah seringkali tidak mengkristal dikalangan pimpinan maupun staf. Bahwa setiap perubahan akan menimbulkan resistensi. Upaya meminimalisir resistensi yang ada dapat dilakukan dengan internalisasi perubahan itu sendiri.

b. Lingkungan Eksternal

a) Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya mempenetrasi proses kerja yang ada di birokrasi pemerintah daerah. Percepatan proses (efisien dan efektif) secara waktu, transparansi, akuntabel menjadi nilai yang dituju dengan kemajuan itu.
- 2) Peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika yang semakin komprehensif. Saat ini belum tersedianya produk hukum bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistik mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri atau kepala lembaga negara yang menangani urusan tersebut dalam memberikan petunjuk teknis kepada pemerintah daerah.
- 3) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satunya Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik. Dengan menjadi bagian utama system pemerintahan elektronik dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa e-government telah menjadi sebuah keniscayaan dari perubahan besar yang ingin dicapai secara nasional.

b) Ancaman/Tantangan

- 1) Semakin tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses. Masyarakat semakin menunjukkan partisipasinya dalam mengontrol pemerintah dengan semakin tingginya nilai-nilai kritis yang disampaikan sebagai pengguna layanan publik.
- 2) Masih adanya ego-sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah terutama dalam hal sharing data dan informasi. Belum adanya kesamaan cara pandang bagi perangkat daerah terhadap pentingnya integrasi data, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan data centre yang menjadi pekerjaan rumah Dinas Kominfo Kabupaten Bangka kedepannya.
- 3) Semakin tingginya kriminalitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi (cyber crime). Bahwa hari ini perangkat daerah beramai-ramai mendisain dan membangun aplikasi atau system informasi, namun tidak dibarengi dengan kesadaran atau pemahaman untuk melakukan upaya pengamanan informasi atau data yang terdapat pada aplikasi/system informasi tersebut.

Secara struktur organisasi, struktur organisasi Dinkominfo saat ini berada dalam bentuk yang relatif sesuai dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang (Bidang IKP, Bidang E- Government, Bidang Persandian dan Bidang Statistik) relatif sesuai dan dapat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Akan tetapi memperhatikan perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat dalam urusan kebijakan penyetaraan jabatan structural kedalam jabatan fungsional

pada tahun 2021, memungkinkan Dinkominfotik untuk dapat mengevaluasi struktur organisasi saat ini, utamanya dalam menyelaraskan tugas pokok dan fungsi pada level bidang dengan nomenklatur kegiatan yang mengacu pada Kepmendagri nomor : 050-5889 Tahun 2021.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4.1. Proses yang dilakukan

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal Renja 2025 pada Renstra 2024-2026 dengan rancangan akhir Renja 2025 (Permendagri nomor 90 tahun 2019).

2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses yang dilakukan

Dalam melakukan review terhadap Rancangan awal Renja 2025 dengan Permendagri 90 tahun 2019 adalah :

- a. Membandingkan antara rancangan awal Renja 2025 (pada Renstra 2024-2026) dengan rancangan akhir Renja 2025 (Permendagri 90/2019)
- b. Melakukan Pemetaan Program dan indikator program
- c. Melakukan pemetaan Kegiatan dan indikator program
- d. Melakukan pemetaan Sub Kegiatan dan indikator Sub Kegiatan
- e. Melakukan pemetaan Rekening Program dan kegiatan yang lama dan rekening baru

2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal.

Setelah melakukan pemetaan dengan membandingkan antara rancangan awal Renja 2026 (pada Renstra 2024-2026) dengan rancangan akhir Renja 2026 (Permendagri 90/2019) pada urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dapat disajikan tabel T.C 31 berikut ini.

Tabel 2.8 (T.C 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.000.436.900,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.729.143.855,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.720.144.580,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.517.878.855,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				6.579.022.910,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				5.358.293.855,00	
			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29,00	204.324.220,00			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	29,00	14.900.000,00	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,75				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,75		
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0,00	4.152.307.257.00,00			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0,00	4.435.850.719,00	
			Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	68,00	55.174.926,00			Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	68,00	55.174.926,00	
			Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah	3,90	266.843.000,00			Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah	3,90	266.843.000,00	
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	1,00	585.525.210,00			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	1,00	585.525.210,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	204.324.220,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	14.900.000,00	
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	6 dokumen	70.324.220,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	6 dokumen	8.450.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan kinerja yang disusun	4 laporan	27.800.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah laporan kinerja yang disusun	4 laporan	6.450.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	4.152.307.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	4.435.850.719,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	4.435.850.719,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	4.435.850.719,00	

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	900 dokumen	-		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	900 dokumen	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	-		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	-	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	18%	60.350.000,00		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	18%	55.174.926,00	
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%					Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		
			Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%					Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	9.750.000,00		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	9.750.000,00	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 orang	45.424.926,00		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 orang	45.424.926,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	383.285.160,00		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	266.843.000,00	
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3					Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	266.843.000,00		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	266.843.000,00	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	-		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	80%	870.674.735,00		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	80%	50.450.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	-		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.450.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.450.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	671.852.655,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	228.035.210,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	81.580.260,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	81.580.260,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140.690.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140.690.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.764.950,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.764.950,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	236.229.140,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	307.040.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	113.890.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	113.890.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	42.460.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	42.460.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.690.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.690.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			100%	1.737.241.670,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			100%	983.540.000,00	
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75	1.737.241.670,00			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75	983.540.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola	100%	1.737.241.670,00	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola	100%	890.840.000,00	
	Sub Kegiatan Relasi Media	Kab. Bangka	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.	1 Laporan	-	Sub Kegiatan Relasi Media	Kab. Bangka	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.	1 Laporan	-	

			terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media					terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				
	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bangka	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	15 Komunitas	-			Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bangka	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	15 Komunitas	-
	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5 Rekomendasi	-			Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5 Rekomendasi	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70 Media	890.840.000,00			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70 Media	890.840.000,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	12 dokumen	-			Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	12 dokumen	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Kab. Bangka	Jumlah Konten Informasi Publik	500 konten	-			Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Kab. Bangka	Jumlah Konten Informasi Publik	500 konten	-
			Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti	100%	92.700.000,00					Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti	100%	92.700.000,00
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	92.700.000,00			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	92.700.000,00
			Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi	25%	-					Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi	25%	-
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2 orang	-			Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Bangka	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2 orang	-
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.517.802.090,00			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.176.045.000,00
			Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (IIP)	100,00%	2.099.450.020,00					Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (IIP)	100,00%	2.176.045.000,00
			Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE	66,67	302.429.980,00					Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE	66,67	2.176.045.000,00
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Nilai domain kebijakan internal	3 Nilai	302.429.98,00			Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Nilai domain kebijakan internal	3 Nilai	2.176.045.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	12 dokumen	-			Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	12 dokumen	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bangka	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	302.429.98,00			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bangka	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	1.840.960.000,00

	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Bangka	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	12 Layanan	-		Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Bangka	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	12 Layanan	-	
	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	-		Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kab. Bangka	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	335.085.000,00		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kab. Bangka	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	335.085.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Bangka	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	-		Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Bangka	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat daerah	-		Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat daerah	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	12 Dokumen	-		Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	12 Dokumen	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM				30.900.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM				30.900.000,00	
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				166.370.230,00		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				30.900.000,00	
			Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	58,82%	166.370.230,00				Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	58,82%	30.900.000,00	
			Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	25,00	166.370.230,00				Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	25,00	30.900.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis	58,82%	30.900.000,00		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis	58,82%	30.900.000,00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Bangka	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	24.750.000,00		Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Bangka	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	24.750.000,00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Bangka	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2 Orang	6.150.000,00		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Bangka	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2 Orang	6.150.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bangka	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	-		Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bangka	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	-	

	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah</i>	1 Laporan	-	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah</i>	1 Laporan	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				386.628.624,80	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				386.628.624,80	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				115.922.090,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				180.365.000,00	
			Indeks KAMI	Kematan gan 1	115.922.090,00			Indeks KAMI	Kematang an 1	180.365.000,00	
			Nilai Kematangan Indeks KAMI	Kematan gan 1	-			Nilai Kematangan Indeks KAMI	Kematang an 1	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Nilai Kematangan Indeks KAMI	Kematan gan 1	115.922.090,00	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Nilai Kematangan Indeks KAMI	Kematang an 1	180.365.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	120.690.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	120.690.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 perangkat daerah	59.675.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 perangkat daerah	59.675.000,00	
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	Kematan gan 1	-	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	Kematang an 1	-	
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	-	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	-	

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak terdapat penambahan jumlah program diluar Rancangan RKPD.
2. Tidak terdapat penambahan jumlah kegiatan diluar Rancangan RKPD.
3. Terdapat perubahan target output pada beberapa Sub Kegiatan antara rancangan RKPD dengan target output Sub Kegiatan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah yang disebabkan analisis dalam penyusunan rancangan yang belum tepat.
4. Terdapat perbedaan jumlah pagu antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah sebagai tindak lanjut penyesuaian target output sub kegiatan, penambahan jumlah kegiatan dengan tetap mempertimbangkan proyeksi kemampuan keuangan daerah.

Hasil analisis kebutuhan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penetapan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target kinerja serta batasan pagu yang akan dituangkan dalam Renja Dinkominfotik Tahun 2026 dengan tetap mempedomani Renstra Dinkominfotik Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026.

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian. Proses penjaringan usulan masyarakat dimulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, terdapat satu usulan dari masyarakat yang telah diakomodir dalam renja Dinas Kominfotik sebagai mana tabel di bawah ini :

Tabel 2.9 (T.C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Desa Petaling, Kec. Mendo Barat	Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE Nilai domain kebijakan internal Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Rp. 100.000.000	Penambahan Jaringan Hotspot

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2024, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan RKPD 2026, dan tantangan pembangunan 2026 maka ditetapkan Tema Pembangunan Tahun 2026 adalah ***“Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi unggulan Secara Berkelanjutan”***. Prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026



Prioritas nasional dalam RKP 2026 untuk Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) mencakup penguatan infrastruktur digital, transformasi digital, dan pengembangan talenta digital. Fokusnya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berikut adalah beberapa poin prioritas nasional yang relevan dengan Kominfo dalam RKP 2026:

1. Penguatan Infrastruktur Digital

Pembangunan dan perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.

2. Transformasi Digital

Mendorong digitalisasi sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan UMKM. Ini mencakup pengembangan platform digital, peningkatan adopsi teknologi, serta fasilitasi kemudahan berusaha secara digital.

3. Pengembangan Talenta Digital

Meningkatkan literasi digital masyarakat, pelatihan keterampilan digital, serta pengembangan ekosistem talenta digital untuk mendukung transformasi digital dan ekonomi digital.

4. Peningkatan Keamanan Informasi dan Siber

Memperkuat keamanan data, infrastruktur digital, dan penanggulangan kejahatan siber.

5. Peningkatan Konten Positif dan Deradikalisasi

Mengembangkan konten positif yang mendidik dan menghibur, serta upaya deradikalisasi melalui media digital.

6. Penguatan Ekosistem Ekonomi Digital:

Mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (startup) digital, pengembangan pasar digital, dan peningkatan inklusi keuangan digital.

Secara keseluruhan, prioritas nasional Kominfo dalam RKP 2026 bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, produktif, dan aman, serta mendukung transformasi ekonomi dan sosial menuju Indonesia yang lebih maju.

Berdasarkan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 diatas dan berkaitan dengantugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/ didelegasikan kepada Daerah, Dinkominfo Kabupaten Bangka mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2026 pada prioritas nasional ke-tujuh dengan Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan indikator kinerja nasional "Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B Keatas terhadap SAKIP (%)". Dukungan terhadap tema, strategi, arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2024 dilaksanakan melalui peningkatan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPD dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2026 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan Tema ***“Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi unggulan Secara Berkelanjutan”***.

Dinkominfotik sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Bangka Tahun 2026

NASIONAL (Prioritas RPJMN 2025-2029)	PROVINSI	KABUPATEN
PN 1. <u>Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)</u>	Prioritas RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung RKPD 2026:	Prioritas RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026:
PN 2. <u>Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru</u>	1. <u>Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya</u>	1. <u>Penguatan Kapasitas Birokrasi</u>
PN 3. <u>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi</u>	2. <u>Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan</u>	2. <u>Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial</u>
PN 4. <u>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Ketaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Pengandang Disabilitas.</u>	3. <u>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya</u>	3. <u>Pembangunan Sumber Daya Manusia</u>
PN 5. <u>Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</u>		4. <u>Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan, Industri, dan Pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)</u>
PN 6. <u>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</u>		5. <u>Pengelolaan Lingkungan Hidup</u>
PN 7. <u>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan</u>		
PN 8. <u>Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur</u>		

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berpedoman pada RKPD Kab.Bangka, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2024-

2026, RKP Tahun 2026; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kep.Babel 2005–2025, RPD Provinsi Kep.Babel 2023–2026, RKPD Provinsi Kep.Babel 2025; dan RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka 2026.

Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatika 3 (tiga) tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2024—2026 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government Public Relations (GPR).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Tema Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah ***“Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi unggulan Secara Berkelanjutan”*** dengan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu :

1. Penguatan Kapasitas Birokrasi
2. Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
3. Pembangunan SDM
4. Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterikatan antara Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat disajikan pada tabel Berikut ini :

Tabel 3.2

Keterkaitan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan Sasaran Pembangunan

Tema: <i>“Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi unggulan Secara Berkelanjutan”</i>		
No.	Prioritas	Sasaran
1.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat
2.	Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Pemerataan Pendapatan
3.	Pembangunan SDM	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak
4.	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan
5.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka dukungan terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas dan dengan tetap mengacu kepada Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran beserta target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.2. Tujuan dan sasaran Dinkominfo pada tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan ke-3 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, yaitu Reformasi Birokrasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Renja Dinkominfotik Tahun 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2026
I.	Meningkatkan Tata Kelola Teknologi informasi dan Komunikasi		Indeks SPBE	2,65
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	100,00
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00
II	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PD	34,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (82,00)

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinkominfotik dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi
- 3) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing Bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinkominfo maupun Pemkab Bangka.

Program dan kegiatan dimaksud oleh Dinkominfo Kab. Bangka telah disusun yang terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

III. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Jumlah Program dan Kegiatan yang direncanakan di Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2026 berjumlah 5 program dan 11 kegiatan serta 19 Sub Kegiatan dengan lokasi kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dan lingkup Kabupaten Bangka. Total dana/pagu indikatif sesuai dengan batasan pagu Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sebesar Rp.8.729.143.855,00 yang bersumber dari APBD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Program-program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada Tahun 2026 mendukung prioritas pembangunan **“Penguatan Kapasitas Birokrasi”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kab.Bangka
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/ Kabupaten)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			8.729.143.855,00							8.018.121.065,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.729.143.855,00							8.018.121.065,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.517.878.855,00							7.882.198.975,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	30,00	5.358.293.855,00						-	5.502.623.955,00	
						Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13,50										
						Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00%										
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,00										
						Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,10										
						Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100,00%										
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar.	100,00%	14.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta emperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	66.100.000,00	
							Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar.	100,00%									
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2026

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	14.900.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		66.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100,00%	4.435.850.719,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	4.120.257.000,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4.435.850.719,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		4.120.257.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100,00% 100,00% 100,00%	55.174.926,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	50.350.000,00	
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Memperkuat sistem pemerintahan yang	Perangkat Daerah		9.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

										Betung	(DAU)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi				IKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	45.424.926,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		40.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah.	100,00%	266.843.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	357.835.160,00	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	266.843.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		357.835.160,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	4,31%	50.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya.	Perangkat Daerah	-	0,00	

												korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi				
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.450.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100,00%	228.035.210,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	671.852.655,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	81.580.260,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		421.800.435,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140.690.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		173.150.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

											penyeludupan.						
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.764.950,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangk at Daerah		76.901.770,00	DINAS KOMUNIK ASI, INFORMAT IKA DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75,00%	307.040.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangk at Daerah	-	236.229.140,00		
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	113.890.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangk at Daerah		174.657.140,00	DINAS KOMUNIK ASI, INFORMAT IKA DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	42.460.000,00	Kab. Bangka, Sungaili at, Bukit Betung	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangk at Daerah		36.572.000,00	DINAS KOMUNIK ASI, INFORMAT IKA DAN STATISTIK	
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit		Kab.	DANA	Memperkuat	Memperkuat	Perangk			DINAS	

						Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		150.690.000,00	Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	at Daerah		25.000.000,00	KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95,00	983.540.000,00					-	280.125.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti Persentase Informasi dan dokumentasi yang dikelola Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	983.540.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat	-	280.125.000,00	
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik										
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	92.700.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat		270.125.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik										
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70 Media	890.840.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif,	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN

												memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi				STATISTIK
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SPLP pada Cakupan Layanan SPBEPersentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	100,00%100,00%	2.176.045.000,00						-	2.099.450.020,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Domain Layanan SPBE Nilai Domain Tata Kelola SPBE Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam kondisi baik Nilai domain kebijakan internal	2.65 2.65 95,00% 2.65	2.176.045.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat	-	2.099.450.020,00	
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	1.840.960.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat		2.089.450.020,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan											
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Aplikasi	335.085.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											

									30.900.000,00							10.000.000,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	100,00 %	30.900.000,00						-	10.000.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100,00% 100,00%	30.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	10.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	68 Orang	30.900.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			180.365.000,00							125.922.090,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	1	180.365.000,00						-	125.922.090,00	

	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Indeks KAMI Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Teknologi Keamanan Informasi Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1 Kematangan 1 Nilai 1 Nilai 100,00%	180.365.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	-	125.922.090,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	120.690.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	34 Perangkat Daerah	59.675.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya. Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah		115.922.090,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	J U M L A H								8.729.143.855,00							8.018.121.065,00	

Pada Tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp. **8.729.143.855,00**.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 11 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian

Renja Perangkat Daerah Dinkominfotik Kabupaten Bangka disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 yaitu ***“Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi Unggulan Secara Berkelanjutan”***, dan penjabaran dari tujuan Dinkominfotik Kabupaten Bangka yang tertuang dalam Renstra yaitu ***“Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi”***.

Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfotik Tahun 2026 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinkominfotik yang telah dituangkan dalam Renstra Dinkominfotik Tahun 2024-2026. Adapun tujuan Dinkominfotik adalah ***“Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi”*** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: ***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinkominfotik”*** dan ***“Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi”***.

Pada tahun 2026 Dinkominfotik akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp.8.729.143.855,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 11 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinkominfotik dan lingkup Kabupaten Bangka.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2026, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Diskominfotik Kabupaten Bangka haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Melakukan reviu kegiatan untuk melihat progres pelaksanaan kegiatan, baik dari segi penjadwalan, faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Selain sebagai pedoman atau acuan kinerja, renja 2026 ini juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas, yang mengandung acuan, bahwa hasil dari setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**Tabel. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bangka
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				5.358.293.855,00	APBD			5.913.065.662,50
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		29,00	14.900.000,00			29,53	35.332.422,00
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		12,75				13,00	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI		0,00	4.435.850.719,00			0,00	4.879.435.790,90
		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah		68,00	55.174.926,00			70,00	60.692.418,60
		Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah		3,90	266.843.000,00			4,00	293.527.300,00
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		1,00	585.525.210,00			1,00	644.077.731,00
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Kab. Bangka	100%	14.900.000,00			100%	35.332.422,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
2.16.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	6 dokumen	8.450.000,00			6 dokumen	22.272.422,00
2.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	4 laporan	6.450.000,00			4 laporan	13.060.000,00
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka	100%	4.435.850.719,00			100%	4.879.435.790,90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	26 orang/bulan	4.435.850.719,00			26 orang/bulan	4.879.435.790,90
2.16.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka	12 laporan	-			12 laporan	-
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Kab. Bangka	18%	55.174.926,00			18%	60.692.418,60
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%				100%	
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik		100%				100%	
2.16.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1 paket	9.750.000,00	APBD		1 paket	10.725.000,00
2.16.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
2.16.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		26 orang	45.424.926,00			26 orang	49.967.418,60
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan		100%	266.843.000,00			100%	293.527.300,00
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		3				3	
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	266.843.000,00			12 laporan	293.527.300,00
5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 dokumen	-			12 dokumen	-
2.16.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	80%	50.450.000,00			80%	55.495.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2.16.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		5 unit	-			5 unit	-
2.16.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	-			1 Paket	-
2.16.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	50.450.000,00			1 unit	55.495.000,00
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	100%	228.035.210,00			100%	250.838.731,00
2.16.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	12 Laporan	81.580.260,00			12 Laporan	89.738.286,00
2.16.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	140.690.000,00			12 Laporan	154.759.000,00
2.16.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	5.764.950,00			12 Laporan	6.341.445,00
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	307.040.000,00			100%	337.744.000,00
2.16.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangka	12 unit	113.890.000,00			12 unit	125.279.000,00
2.16.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangka	40 Unit	42.460.000,00			40 Unit	46.706.000,00
2.16.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangka	1 Unit	150.690.000,00			1 Unit	165.759.000,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			100%	983.540.000,00	APBD		100%	1.081.894.000,00
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik		75	983.540.000,00			85	1.081.894.000,00
02.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola	Kab. Bangka	100%	890.840.000,00			100%	979.924.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
02.16.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Bangka	1 Laporan	-			1 Laporan	-
02.16.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Bangka	15 Komunitas	-			15 Komunitas	-
02.16.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	5 Rekomendasi	-			5 Rekomendasi	-
02.16.02.2.01.0022	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Bangka	70 Media	890.840.000,00			70 Media	979.924.000,00
02.16.02.2.01.0023	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kab. Bangka	12 dokumen	-			12 dokumen	-
02.16.02.2.01.0023	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Bangka	500 konten	-			500 konten	-
		Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti		100%	92.700.000,00			100%	101.970.000,00
02.16.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Bangka	12 Permohonan	92.700.000,00			12 dokumen	101.970.000,00
		Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi		25%	-			50%	-
02.16.02.2.01.0024	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Bangka	2 orang	-			2 orang	-
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.176.045.000,00	APBD			2.176.045.000,00
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIIP)		100,00%	2.176.045.000,00			100,00%	2.176.045.000,00
		Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE		66,67	2.176.045.000,00			83,33	2.176.045.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
02.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai domain kebijakan internal	Kab. Bangka	3 Nilai	2.176.045.000,00			4 Nilai	2.176.045.000,00
02.16.03.2.02.00 19	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Bangka	12 dokumen	-			12 dokumen	-
02.16.03.2.02.00 24	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bangka	34 Perangkat Daerah	1.840.960.000,00			34 Perangkat Daerah	1.840.960.000,00
02.16.03.2.02.00 25	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Kab. Bangka	12 Layanan	-			12 Layanan	-
02.16.03.2.02.00 26	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Bangka	1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
02.16.03.2.02.00 34	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	5 Aplikasi	335.085.000,00			5 Aplikasi	335.085.000,00
02.16.03.2.02.00 35	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Bangka	1 Laporan	-			1 Laporan	-
02.16.03.2.02.00 36	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		34 Perangkat daerah	-			34 Perangkat daerah	-
02.16.03.2.02.00 37	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		12 Dokumen	-			12 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				30.900.000,00				-
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				30.900.000,00	APBD			-
		Persentase Data Sektoral yang terintegrasi		58,82%	30.900.000,00			79,41%	-
		Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi		25,00	30.900.000,00			50,00	-
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis	Kab. Bangka	58,82%	30.900.000,00			79,41%	30.900.000,00
2.20.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kab. Bangka	100%	24.750.000,00			100%	24.750.000,00
2.20.02.2.01.0020	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Bangka	2 Orang	6.150.000,00			2 Orang	6.150.000,00
2.20.02.2.01.0021	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Kab. Bangka	100%	-			100%	-
2.20.02.2.01.0022	Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Kab. Bangka	1 Laporan	-			1 Laporan	-
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				386.628.624,80				386.628.624,80
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				180.365.000,00	APBD			198.401.500,00
		Indeks KAMI		Kematangan 1	180.365.000,00			Kematangan 1	198.401.500,00
		Nilai Kematangan Indeks KAMI		Kematangan 1	-			Kematangan 1	-
2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Indeks KAMI	Kab. Bangka	Kematangan 1	180.365.000,00			Kematangan 1	198.401.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2.21.02.2.01.000 5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Bangka	2 Laporan	120.690.000,00			2 Laporan	132.759.000,00
2.21.02.2.01.000 7	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Bangka	34 perangkat daerah	59.675.000,00			34 perangkat daerah	65.642.500,00
2.21.02.2.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	Kab. Bangka	Kematangan 1	-			Kematangan 1	-
2.21.02.2.02.000 2	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kab. Bangka	1 Kegiatan	-			34 perangkat daerah	-
JUMLAH					8.729.143.855,00				9.369.406.162,50

LAMPIRAN III SURAT SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : B-000.7.5/445/BAPPEDA-V/2025
TANGGAL : 9 Juli 2025

JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024 - Minggu I Februari 2025	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2024	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	2 Februari 2025		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	14-25 Januari 2025		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	3-13 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua Februari 2025	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	14 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2025	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	17-28 Februari 2025		Seluruh PD
8	Input Rancangan Renja PD ke SIPD	17 Februari - 7 Maret 2025	Seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda	Input Rancangan Renja PD ke SIPD
9	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	25-27 Februari 2025	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Perangkat daerah dikoordinasikan oleh Bappeda
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	10-14 Maret 2025		Bappeda dan Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	9 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda

12	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir Renja PD	9 Juli 2025		Bappeda
13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	10-15 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	16-23 Juli 2025	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Reviu Ranhir Renja PD oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut oleh PD	24 Juli-5 Agustus 2025		Inspektorat dan Seluruh PD
16	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	6-7 Agustus 2025		Bappeda
17	Penetapan Renja PD melalui Perbup	8 Agustus 2025	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1308 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

B. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.2/1308/BAPPEDA/2024
 TANGGAL : 5 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sri Yulisafildiana, S.AP	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Tedy Heryawan, SE	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sufandi, A.Md	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ikhsan Arfani	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Prencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Ervin Septiawan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Rizki Amiliasari	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Yusnila Sari, S.Si	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penangulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penangulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penangulangan Bencana Daerah/ Sulfiana, S.AB	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan/Angga Hidayatullah Eza, S.Si	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Fasilitas Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitas Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII.KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAawang

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII.KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Suharpin	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Meggi	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Uci Oktariza	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Novela Sumalia	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Misleni Indah Purwati	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR

